



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 705 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 16
TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 45);
21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

22. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2023 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

WILAYAH	BULAN											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
IRBANWIL II	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Tim I)	Pemeriksaan Ketaatan Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan dan Bidang Pengelolaan Arsip (Tim II)	Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2022 (Tim II)	Audit Kinerja Bidang Keluarga Berencana Tahun 2022	Pemeriksaan Ketaatan BKD dan Diklat	Reviu Renja SKPD Tahun 2024	Reviu DAK Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana TA 2023	Pemeriksaan Ketaatan : 1. Bidang Perindustrian dan 2. Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan 3. Sekretariat pada Disperdagin	Reviu RKA Perubahan 2023 (Tim II)	Pengawasan P3DN	Pemeriksaan Ketaatan Dinkop UMTK	Pemeriksaan Ketaatan Kecamatan Banjarmasin Utara (Tim II)
	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Tim II)	Reviu Laporan Keuangan SKPD Pemko Banjarmasin TA 2022 (Tim I)					Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan (MCP KPK)	Reviu DAK Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana TA 2023	Reviu RKA 2024 (Tim I)		Pemeriksaan Ketaatan Kecamatan Banjarmasin Selatan (Tim I)	Penutupan Kas Akhir Tahun 2023 (Tim I)
		Pemeriksaan Ketaatan DPMPSTP (Tim II)					Reviu Manajemen ASN (MCP KPK)		Reviu RKA 2024 (Tim II)		Pemeriksaan Ketaatan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Tim II)	Penutupan Kas Akhir Tahun 2023 (Tim II)
IRBANWIL III	Penutupan Kas dan Stock Opname Persediaan Akhir Tahun Anggaran 2022 SKPD	Reviu Laporan Keuangan SKPD TA 2022	Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2020	Melakukan Proby Audit atas Pembangunan Pengadaan Jalan di Komplek Perumahan Paket 4	Reviu atas Tata Kelola BMD Tahun 2023	Verifikasi dan Validasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Reviu DAK 2023	Reviu RKA Perubahan TA 2023	Reviu RKA TA 2024	Reviu DAK 2023	Reviu DAK 2023	Reviu DAK 2023
	Reviu DAK 2022	Melakukan Monitoring atas Pelaksanaan Stock Opname Vaksin COVID-19	Reviu Laporan Keuangan Pemko TA 2021	Reviu Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN	Reviu atas Tata Kelola Pajak Tahun 2023	Reviu SBU, ASB, HSPK Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024	Reviu KUA PPAS TA 2024	Reviu DAK 2023	Reviu DAK 2023	Proby audit	Audit Kinerja	Penutupan Kas Akhir Tahun 2023
		Reviu DAK	Reviu DAK	Monitoring Penyerapan APBD		Reviu Ranhir Renja 2024	Reviu KUPA TA 2023	Reviu atas Rencana Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di Luar Cakupan Layanan BPJS dari Klaim dan Pendamping RSUD Sultan Suriansyah TA 2022	Monitoring Penyerapan APBD			Monitoring Penyerapan APBD
						Monitoring Penyerapan APBD						

WILAYAH	BULAN												
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
IRBANSUS	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Saber Pungli	Sosialisasi LHKASN	Monitoring dan Evaluasi LHKPN	Pendampingan Zona Integritas	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Prioritas dan Strategis	Monitoring dan Evaluasi MCP KPK RI	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Prioritas dan Strategis	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Prioritas dan Strategis	Reviu Bantuan Pemerintah Daerah (Hibah dan Bantuan Sosial)	Monitoring dan Evaluasi RB	Evaluasi Benturan Kepentingan	Sosialisasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga	Monitoring dan Evaluasi LHKPN
		Monitoring dan Evaluasi TL RB						Monitoring dan Evaluasi LHKAN					
		Monitoring dan Evaluasi LHKAN	Monitoring dan Evaluasi LHKAN	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Prioritas dan Strategis			Sosialisasi SPI	Monitoring dan Evaluasi MCP KPK RI	Sosialisasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga	Sosialisasi Saber Pungli dan Gratifikasi	Monitoring dan Evaluasi MCP KPK RI	Monitoring dan Evaluasi MCP KPK RI	
-----TINDAK LANJUT PERJANJIAN KERJASAMA APIP DAN APH -----													
----- PENGAWASAN PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT -----													
SEKRETARIAT	Monitoring												

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA